

KONTRIBUSI DANIEL C. HALLIN DAN PAOLO MANCINI TERHADAP PERS INDONESIA

Abstrak

Keberadaan pers umumnya adalah sebagai media penekan dalam masyarakat, atau dalam makna yang lebih sempit pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Kembang kempis pers di Indonesia dan berbagai perubahan yang terjadi selalu mengiringi perkembangan politik Indonesia sampai saat ini. Tulisan ini akan membahas tentang kontribusi Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini dalam melihat pers Indoensia. Halin dan Mancini adalah tokoh besar yang fokus melihat dinamika sistem pers di berbagai negara. Mereka membandingkan sistem pers diberbagai negara yang berujung kepada penemuan tiga model media dan politik. Dengan tiga model media dan politik tersebut setidaknya kita bisa memahami dan memetakan bagaimana pers di Indonesia

Kata Kunci: Tiga model media dan politik, Pers

PENDAHULUAN

Dalam *Black's law dictionary* (1990) mengarikan pers sebagai *the aggregate of publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase "liberty of press" freedom of the press is guaranteed by the first amendment.* Atau merupakan kegiatan mengumpulkan fakta dan mempublikasinya melalui media cetak merupakan bentuk kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang. Fungsi utama pers pada umumnya disamping sebagai kontrol sosial dalam menjalin komunikasi terhadap masyarakat tetapi juga menjalin komunikasi terhadap pemerintah. Fungsi pers dapat dilihat menjadi empat bagian:

- Menyebarluaskan infomasi

- Melakukan kontrol sosial dan konstruktif
- Menyalurkan aspirasi masyarakat
- Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat

Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm menjelaskan tentang empat teori pers yang bisa kita dengar dengan *four theories of the press* yaitu:

- *The authoritarian*
- *Libertarian*
- *Social responsibility*
- *Sovyet communist concept*

Keempat teori tersebut secara garis besar dapat di artikan sebagai berikut:

A. Teori pers *the authoritarian*

Teori pers otoritarian ini muncul pada masa renaissance yang perpajak tentang kebenaran. Pada masa ini pers bergerak dari atas ke bawah, maksudnya adalah pers digunakan penguasa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut biasanya berbicara tentang kegiatan pengusa, perkembangan yang telah di dapat pengusa, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dirasa penting agar masyarakat mengetahui kenerja penguasa dan masyarakat wajib mendukung produk-produk penguasa.

B. Teori pers libertarian

Teori pers libertarian ini muncul pada abad 17 sampai abad 19 sebagai imbas dari munculnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi politik, kebebasan beragama, dan mobilisasi ekonomi. Teori ini menunjukan bahwa manusia tidak senantiasa selalu dituntun oleh

penguasa, tetapi masyarakat dapat mencari elternatif yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. pada level ini pers digunakan sebagai mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan kebebasan untuk berpendapat atas fenomena apapun, baik politik, sosial, dan budaya.

C. Teori pers tanggung jawab sosial

Teori pers tanggung jawab sosial lahir dari perkembangan libertarian. Umumnya lahir di negara-negara non komunis yang berkembangan diabad 20. teori ini beranjak pada fakta yang bagaimana yang akan diberikan kepada masyarakat, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Teori ini menilai kekuadan dan masyarakat harus diiringi dengan tanggunug jawan kepada masyarakat.

D. Teori pers Sovyet komunis

Teori pers Sovyet komunias merupakan perkembangan dari otoritarian berdasarkan ajaran Marxis. Teori ini berkembang di Uni Sovyet sebagai konsekuensi dari ajaran Marxis. Teori ini melihat pers sebagai milik negara. Pada level ini masyarakat dianggap memerlukan tuntutan dari penguasa.

Tiap negara mempunyai prinsip masing-masing terhadap pers mereka. Masing-masing teori mempunya kelebihan dan kekurangan yang disebabkan oleh pengalaman yang berbeda. Menurut Siebert perbedaan itu sebagain mencerminkan kemampuan sebuah negara membiayai persnya. Demi kian pula dengan perbedaan apa yang orang lakukan di tempat yang berbeda sehingga dari pengalaman itu menentukan apa yang meraka ingin baca. Lebih spesifik perbedaan itu muncul dari warna struktur politik dimana pers berada. Hal tersebutlah yang perhatikan Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, mereka berhasil memetakan sistem pers yang berjalan di beberapa negara. Mereka mengelompokkanya kedalam tiga bagaian yaitu: Peratama, *Mediterranean or Polarized Pluralist Model* yang mencangkup negara Prancis, Italy,

Portugal, Spayol, dan Yunani. Kedua, *Northern European or Democratic Corporatist Model* yang meliputi negara Austria, Belgia, Denmark, Finland, Jerman, Belanda, Norwegia, Swiss, Switzerland. Ketiga, *North Atlantic or Liberal Model* yang meliputi negara Inggris, Amerika Serikat, Canada, dan Irlandia. Dari ketiga penggolongan tersebut maka lihirlah tiga model media dan politik. Lebih lanjut akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya di bawah ini.

PEMBAHASAN

(Three Model Of Media and Politics) Daniel C. Hallin and Paolo Mancini

Berikut ini adalah penjelasan tiga model media dan politik Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, diawali dengan dari *Mediterranean or Polarized Pluralist Model*, *Northern European or Democratic Corporatist Model*, dan *North Atlantic or Liberal Model*.

1. *Mediterranean or Polarized Pluralist Model*

Berikut adalah tabel yang digambuat Daniel C. Hallin and Paolo Mancini dalam melihat sistem pers negara Prancis, Italy, Portugal, Spayol, dan Yunani.

Industri media	Masih rendah, dan masih tetap berorientasi kepada kepentingan elit politik
Politik Parallelism	kekuasaan politik pemerintah masih tinggi, isi jurnalisme masih berkutat kepada komentar dan kegiatan pemerintah
Profesionalisme	Sebagai instrumen dan kurang profesional
Peraturan negara dan sistem media	Intervensi negara kuat: adanya sensor
Sejarah politik: pola konflik dan konsensus	akhir demokratisasi; pluralisme terpolarisasi
Konsensus atau	Baik

majoritas pemerintah	
Individu dan organisasi pluralis	Organisasi pluralis: kuat peranannya dalam partai politik
Peraturan pemerintah	dirigisme, keterlibatan yang kuat dari negara dan pihak dalam perekonomian; periode otoritarianisme, negara kesejahteraan yang kuat di Perancis Italy
Rasional otoritas hukum	lemah pengembangan otoritas hukum rasional,

Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini melihat bahwa negara – negara yang tergabung kedalam *Mediterranean or Polarized Pluralist Model* memiliki sembilan karakteristik. Pertama, dilihat dari industri media, pertumbuhan mereka masih bisa dibilang rendah dan industri media yang ada berorientasi kepada kepentingan elite politik. Kedua, dilihat dari politik parallelism, jelas bahwa konten jurnalis yang dibentuk masih berkutat dengan komentar – komentar dan kegiatan pemerintah. Hal ini sama seperti yang jabarkan Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm tentang teori pers autoriatarian dan *Soviet communist concept*. Ketiga, tingkat profesionalitas pers masih lemah atau biasa dibilang kurang profesional. Keempat, Peraturan negaran dan sistem media masih sangat ketat, hal ini berdampak kepada adanya sensor di setiap berita yang beredar. Kelima, Dilihat dari sejarah politik negara – negara mediteranian terbentuk dari pola konflik dan konsesus, artinya tidak ada demokratisasi. Keenam, konsensus yang diciptakan pemerintah masih relatif baik. Ketujuh, sikap individu dan orang-orang yang berada cenderung pluralis, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa partai atau organisasi politik dalam mencari kekuasaan. Kedelapan, peraturan pemerintah masih dirigisme, keterlibatan yang kuat dari negara dan pihak dalam dunia perekonomian. Kesejahteraan negara yang diterapkan oleh

negara Perancis dan Italy. Dan terakhir, rasional otoritas hukum masih lemah dan masih pengembangannya otoritas hukum rasional yang berlaku.

2. *Northern European of Democratic Corporatist Model*

Berikut adalah tabel yang digambuat Daniel C. Hallin and Paolo Mancini dalam melihat sistem pers negara Austria, Belgia, Denmark, Filandia, Jerman, Belanda, Norwaygia, Swiss, dan Switzerland.

Industri media	Berkembang
Politik Parallelism	Pluralisme eksternal terutama di pers nasional: pers partai historis yang kuat; pergeseran ke arah pers komersial netral; politik dalam sistem penyiaran dengan otonomi yang substansial
Profesionalisme	Institusi kuat dan regulasi diri
Peraturan negara dan sistem media	intervensi negara yang kuat namun dengan perlindungan bagi kebebasan pers
Sejarah politik: pola konflik dan konsensus	awal demokrasi: pluralisme moderat,
Konsensus atau mayoritas pemerintah	terutama konsensus
Individu dan organisasi pluralis	Organisasi pluralis: pluralis tersegmen dan korporasi demokrasi
Peraturan pemerintah	kesejahteraan negara kuat: keterlibatan signifikan dari negara dalam perekonomian
Rasional otoritas hukum	pengembangan yang kuat otoritas hukum rasional

Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini melihat bahwa negara – negara yang tergabung kedalam *Northern European of Democratic Corporatist Model* memiliki sembilan karakteristik. Pertama, dilihat dari industri media, pertumbuhan mereka masih bisa dibilang berkembang masing – masing institusi pers mulai memberikan sentuhan – sentuhan dalam beritanya Kedua,

dilihat dari politik parallelism, masih bergantung kepada pluralisme eksternal, terutama pers nasional. Pers dianggap masih sebagai refleksi partai yang berkuasan dan pergeseran pers mulai mengarah kepada komersialisasi yang netral. Perkembangan sistem politik dalam sistem penyiaran bersifat otonom dan substansial. Ketiga, tingkat profesionalitas pers dinegara *Northern European* mulai mempunyai institusi yang kuat sehingga bisa menciptakan regulasi diri pada setiap insan pers. Keempat, Peraturan negaran dan sistem media masih sangat ketat, namun masih adanya perlindungan bagi kebebasan pers. Kelima, Dilihat dari sejarah politik negara – negara *Northern European* mulai terbentuk demokrasi yang pluralisme. Keenam, konsensus yang diciptakan pemerintah masih mengutamakan kepentingan konsensus baik. Ketujuh, sikap individu dan oranganiasi yang berada cenderung tersegmen dan terbentuknya korporasi demokrasi. Kedelapan, peraturan pemerintah masih memperhatikan kesejahteraan negara keterlibatan signifikan dari negara dalam perekonomian. Dan terakhir, rasional otoritas hukum dan masih kuat otoritas hukum rasional. Jika diperhatikan meikiran Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini tentang *Northern European of Democratic Corporatist Model* sama dengan pemikiran Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm dalam teori pers *Social responsibility*.

3. *North Atlantic or Liberal Model*

Berikut adalah tabel yang digambuat Daniel C. Hallin and Paolo Mancini dalam melihat sistem pers negara Inggris, Amerika Serikat, Canada, dan Irlandia.

Industri media	Masa komersial
Politik Parallelism	netral komersial tekan: informasi jurnalisme berorientasi pluralisme internal yang model profesional sistem pemerintahan otonom siaran resmi

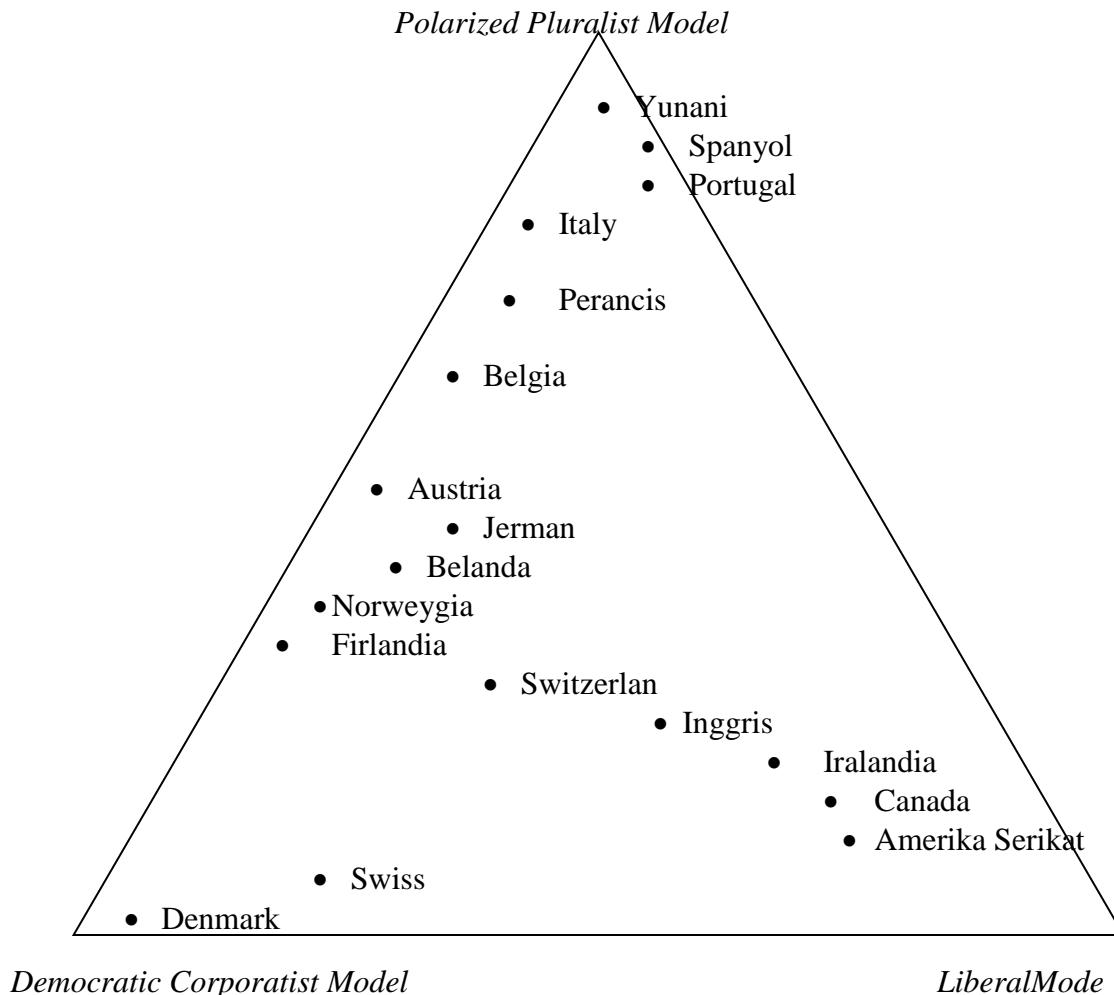
Profesionalisme	Tidak dalam Institusi kuat dan regulasi diri
Peraturan negara dan sistem media	Dominasi pasar
Sejarah politik: pola konflik dan konsensus	awal demokrasi: pluralis moderat
Konsensus atau mayoritas pemerintah	Dominasi mayoritas
Individu dan organisasi pluralis	Representasi individu bukan pluralisme terorganisir
Peraturan pemerintah	Liberalisasi negara kesejahteraan pekerja khususnya di AS
Rasional otoritas hukum	Pengembangan kuat hukum rasional

Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini melihat bahwa negara – negara yang tergabung kedalam *North Atlantic or Liberal Model* memiliki sembilan karakteristik. Pertama, dilihat dari industri media, pertumbuhan media di negara – negara tersebut tergolong maju, selain dilengkапan perangkat teknologi yang baik arah sudah menuju arah komersialisasi. Kedua, dilihat dari politik parallelism, masih bergantung kepada pluralisme eksternal, terutama pers nasional. Pers dianggap komersial yang netral, informasi yang diberikan jurnalisme berorientasi kepada pluralisme internal, tetapi sistem yang dibangun pemerintah masih mempunyai peluang untuk membuat siaran otonom resmi. Ketiga, tingkat profesionalitah *North Atlantic or Liberal Model* tidak mempunyai institusi yang kuat dan tidak ada ketentuan regulasi diri disertai insan pers. Hal ini menunjukan kebebasan yang hanya mengarah kepada komersialisme.vKeempat, Peraturan negaran dan sistem media didominasi oleh kepentingan pasar atau komersial. Kelima, Dilihat dari sejarah politik negara – negara *North Atlantic or Liberal Model* mulai terbentuk demokrasi yang pluralisme moderat. Keenam, konsensus yang diciptakan pemerintah didominasi mayoritas masyarakat. Ketujuh, sikap individu dan orangansasi mengarah kepada representasi individu

bukan pluralisme terorganisir. Kedelapan, peraturan pemerintah mempfokuskan kepada liberalisasi dengan mensejah terakan pekerja pers khususnya di Amerika Serikat. Dan terakhir, rasional otoritas hukum dan masih kuat otoritas hukum rasional.

Namun dari ketiga model tersebut tidak serta merta negara yang tergolong dalam kelompok tersebut menganut sistem yang sama. Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini melihat faktor terpenting yang mempengaruhi sistem media tersebut adalah sejarah yang sama diantara negara, kongsi politik, dan letak geografis. Oleh sebab itu Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini menggambarkan segitiga relasi antar negara tersebut. Berikut adalah bagan *Relation of indivisul cases to the three models*

Jika kita perhatikan diantara model *Democratic Corporatist* dan *Polarized Pluralist* negara yang paling dekat bersinggungan adalah Belgia dan Prancis. Kedua negara tersebut karena letak geografisnya hampir bergandengan, sistem pers yang terjadi antara negara tersebut saling mengadopsi. Bisa di katakan Prancis yang tidak menganut seratus persen sistem *Polarized Pluralist*, tetapi iya juga mengadopsi sistem *Democratic Corporatist* yang di dapat dari negara Belgia. Sebaliknya pun seperti itu Belgia tidak menganut seratus persen terhadap sistem *Democratic Corporatist*, tetapi iya juga mengadopsi sistem *Polarized Pluralist*. Hal ini tentunya berbeda juga negara – negara tersebut berada di sudut – sudut segitiga tersebut telihat bahwa Denmark adalah negara yang sangat menganut sistem *Democratic Corporatist*, begitu pula dengan negara Yunani yang sangat menganut sistem *Polarized Pluralist*. Pemahaman tersebut nampaknya akan sama jika kita melihat Liberal model. Pada sudut segitiga terlihat bahwa Amerika Serikat lebih menganut sistem *Liberal model*. Hampir sama dengan Belgia dan Pranci, Inggris pun merupakan negara yang dekat dengan sistem *Democratic Corporatist*, Inggris pun bisa dikatakan tidak menganut seratus persen sistem *Liberal model*



Democratic Corporatist Model

Liberal Model

Setalah kita melihat secara sekilas apa itu pers? Melihat teori-teori yang digunakan, sertam melihat dari perspektif komparasi media, maka terlihat jelas bagaimana suatu negara menganut sistem persnya. Kemudian yang menjadi fokus kita adalah bagaimana dengan sistem pers Indonesia? tentunya hal ini akan menarik kita lihat dari teori dan pendekatan perspektif komparasi media. Sebelum lebih dalam melihat bagaimana sistem pers Indonesia, penulis terlebih dahulu ingin bercerita bagaimana dinamika sistem pers Indonesia dijaman dahulu hingga saat ini. Hal ini diharapkan agar kita mengetahui proses perkembangan sistem pers Indonesia. Tawaran diakhir makalah ini adalah menentukan dimanakan posisi sistem pers Indonesia saat ini.

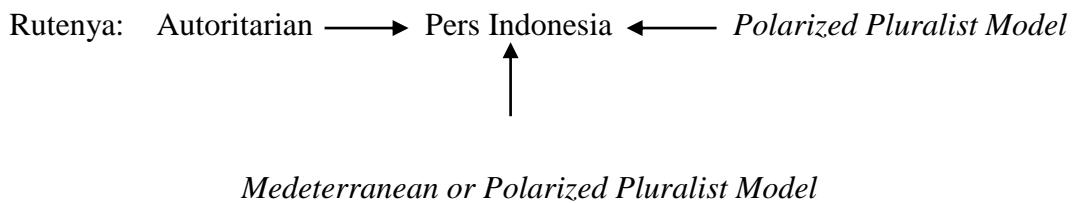
Rutanya : Autoritarian → Pers Indonesia ← *Polarized Pluralist Model*

Pers pada masa Orde Lama

Pers dimasa Orde Lama bisa digolongkan kedalam demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950. Awal pembatasan pers di masa demokrasi liberal adalah efek samping dari keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina, namun pemerintah tidak membatasi pemberitaan pers asing saja tetapi terhadap pers nasional. Demokrasi liberal berakhir ketika Orde Lama dimulai. Era demokrasi liberal adalah sejak Pemilu 1955 hingga Dekrit Presiden 1959. Berikut ini adalah ciri-ciri pers pada masa orde lama

- Pers berafiliasi ke partai politik amat banyak dan justru oplahnya tinggi. Contohnya: Suluh Marhaen ke PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Bintang Timur berafiliasi ke PKI (Partai Komunis Indonesia)
- Penyerangan terhadap lawan politik amat lazim. Headline (kepala berita) dan karikatur yang sarkastis/kasar amat lazim digunakan. Bahkan tidak tabu menggambarkan lawan politik sebagai anjing misalnya, meski ia menjabat sebagai menteri sekalipun.
- Menjelang Orde Lama jatuh, muncul media massa yang anti Soekarno dan Orde Lama. Terbagi menjadi media kampus seperti Harian KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) atau Gelora Mahasiswa UGM. Sementara media umum seperti Kompas.
- Radio swasta niaga nyaris tidak ada. Hanya ada RRI yang jangkauannya luas. Namun ada radio komunitas yg dibuat mahasiswa seperti Radio ARH (Arief Rahman Hakim) dari UI dgn jangkauan terbatas.

Pada masa ini jika kita lihat dengan teori Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm, maka terlihat jelas Indonesia pernah mengalami sistem pers yang autoritarian. Pers pada masa ini dikhkususkan hanya sebagai corong pemerintah, berita pada saat itu hanya berisikan produk kebijakan – kebijakan pemerintah, keberhasilan pemerintah, dan kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah. Pada masa ini kontrol pemerintah masih kuat dalam mengendalikan pers. Sedangkan jika lihat dari pendekatan Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, walaupun pada masa ini politik Indonesia masuk kepada Era demokrasi liberal, namun hal ini berbeda dari sistem persnya. Pada masa ini lebih cocok masuk kedalam *Medeterranean or Polarized Pluralist Model*. Fungsi pers tidak lebih dari sekedar alat pemerintah yang digunakan untuk menuntun dan memberikan informasi kepada masyarakat.



Pers pada masa Orde Lama

Fungsi Dewan Pers pada masa Orde Baru Dewan pers adalah lembaga yang menaungi pers di Indonesia. Sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999, dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Ada tujuh fungsi dewan pers yang diamanatkan UU, diantaranya

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat adn pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
7. Mendata perusahaan pers.

Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, social, budaya, dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomi pun semakin pesat. Namun sangat tragis, bagi dunia pers di Indonesia. Dunia pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan pada masa orde baru, malah sebaliknya. Namun hal ini bertolak belakang dari kenyataanya, hal ini terbukti dari pembredelan Tempo. (Aliansi Jurnalis Independen, 1995 : 140) Sebelum dibredel pada 21 Juni 2004, Tempo menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di Indonesia. Pemimpin Editornya adalah Gunawan Mohammad yang merupakan seorang panyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. Pada 1982 majalah Tempo pernah ditutup untuk sementara waktu, karena berani melaporkan situasi pemilu saat itu yang ricuh. Namun dua minggu kemudian, Tempo diizinkan kembali untuk terbit. Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap Tempo, sehingga majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah.

Pada massa ini jika kita lihat dengan teori Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm, terlihat bahwa ada misi menuju arah demokrasi dengan memberikan kebebasan pada pers, namun nuansa kekuasaan masih kuat. Pada massa ini pers masih dibilang kendali autoritarian. Pers pada masa ini mulai berani memberitakan fakta –fakta yang menyangkut masalah pemerintah, mulai berani mengangkat keburukan – keburukan pemerintah. Namun dengan kasus Tempo tersebut terlihat jelas bahwa kekuatan pemerintah lebih kuat dan berujung kepada pembredelan. Pada masa ini kontrol pemerintah masih kuat dalam mengendalikan

pers. Sedangkan jika lihat dari pendekatan Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini. Pers Indonesia bisa dibilang berada ditengah-tengah antara *Polarized Pluralist Model* dan *Democratic Corporatist Model*, yang dicontohkan adalah seperti negara Prancis dan Belgia. walaupun arahnya menuju kearah demokrasi tetapi sikap autoritarian masih kuat terhadap produk pers. Pembeidelan Tempo cukup menjadi catatan buruk pemerintah terhadap kebebasan memberi dan mendapatkan informasi.

Pers masa Reformasi dan kini

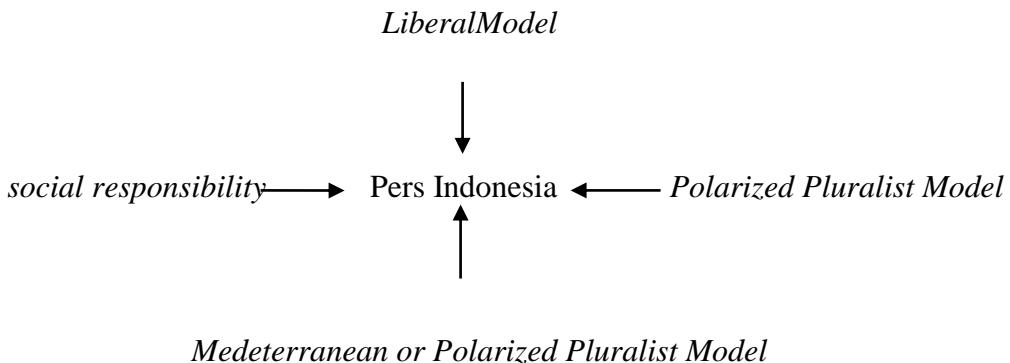
Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara (pasal 4) dan terhadap pers nasional tidak lagi diadakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demi kepentingan dan ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan. Hingga kini Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Namun kegiatan jurnalisme ini juga cukup banyak yang melanggar kode etik pers sehingga masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tidak hanya sampai disitu kolongmerasi media cukup mengurita. Walaupun sudah ada undang –undang yang mengatur tersebut, tetapi masih saja bisnis media saat ini masih jauh dari baik. Sehingga yang dirugikan kemudian adalah masyarakat Indonesia.

Pada massa ini jika kita lihat dengan teori Fred S. Siebert Theodero Perton dan Wilbur Schramm, terlihat bahwa ada misi menuju arah demokrasi dengan

memberikan kebebasan pada pers. Pancasila adalah dasar dari pers Indonesia, dengan penekanan pada pers yang bebas dan bertanggung jawab atau di dalam perkembangan berikutnya adalah kebebasan pers profesional. Sistem pers yang demikian adalah perkembangan dari teori pers *social responsibility*. Operasional dari teori ini adalah dengan menyatukan dalam freedom dan responsibility. Di dalamnya terkandung prinsip *free expression, free speech, free opinion, dan free press* (Harmoko, 1983: 3).

Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini. Pers Indonesia bisa dibilang berada ditengah-tengah antara *Polarized Pluralist Model*, *Democratic Corporatist Model*, dan *Liberal Model*. Tidak adanya kejelasan posisi pers yang jelas saat ini. Ada yang terlalu mementingkan kepentingan pasar atau kapitalis, ada juga beberapa media kita yang dimiliki aktor politik, dan kontrol pemerintah terkadang menyerang sistem pers saat ini.

Rutenya:



PENUTUP

Kontribusi yang diberikan Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini kepada sistem pers Indonesia adalah kita dapat memahami fase –fase sistem pers yang terjadi di Indonesia dari masa Orde lama hingga saat ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah belum ada pendekatan yang cocok untuk melihat sistem pers Indonesia. hal ini terjadi karena pers di Indonesia belum bisa menempatkan posisi mereka. Apakah

sebagai corong pemerintah? apakah sebagai pengikut kapitalis? apakah penggas demokrasi? Jika diperhatikan dari tiga pertanyaan tersebut, Indonesia bermain di tiga lini tersebut. Peran politik masih berpengaruh kepada kehidupan organisasi media kita, hal ini terlihat dari media –media yang dimiliki aktor politik dan pebisnis. Acap kali kita sering melihat berita yang seragam atau berita yang mementingkan golongan tertuju. Kita masih belum bisa independent untuk memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Tantangan kedepan adalah sistem pers menyambut era konvergensi media yang tentunya akan menjadi cerita lain bila masyarakat sudah bisa memiliki informasi yang mereka inginkan.